

Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Putri Atuna¹, Udin Hamim², Juriko Abdussamad³

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 27, 2025

Revised April 09, 2025

Accepted April 15, 2025

Available online April 28, 2025

Keywords:

Transparansi, Dana Desa, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kecamatan Posigadan.

Keywords:

Transparency, Village Fund, Accountability, Community Participation, Posigadan Sub-district



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa desa di Kecamatan Posigadan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di kecamatan ini masih belum optimal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, serta kurangnya keterbukaan dalam proses pengelolaan dan dokumentasi anggaran. Meskipun terdapat upaya pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, masih diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Penelitian

ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola desa dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam penerapan asas transparansi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dana desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze transparency in managing the village fund in Pasigadan Sub-district, South Bolaang Mongondow Regency. Transparency in managing village funds is crucial to ensure that allocation and utilization align with the principles of accountability, participation, and budget discipline. The study employed a qualitative approach with a descriptive research method. Data were collected through interview, Observation, and documentation from several villages in Posigadan Sub-district. The findings show that transparency in managing village fund in the sub-district remains suboptimal. The main challenges identified include limited public access to village financial information, minimal community involvement in planning deliberations and a lack of openness in the management and documentation processes. Although village governments have made efforts to improve transparency, more effective strategies are still needed, such as using information technology and enhancing the capacity of village officials. This study strengthens village governance by emphasizing the importance of transparency to support better village development. The implications of this study highlight the need for stricter policies to enforce principles of transparency and increase community participation in monitoring the village fund.

PENDAHULUAN

Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata, keberadaan dana desa telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Dana desa, yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, meskipun dana desa memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan, pelaksanaan pengelolaan anggaran ini sering kali menghadapi tantangan. Salah satu isu yang paling mendesak adalah transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat sasaran dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

Di kecamatan posigadan, kabupaten bolaang mongondow selatan, dana desa telah digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Meskipun begitu, hasil observasi awal menunjukkan adanya kendala dalam transparansi pengelolaan dana desa. Masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Salah satu penyebab utama adalah terbatasnya akses informasi mengenai dokumen-dokumen pengelolaan anggaran desa, serta kurangnya sosialisasi tentang bagaimana masyarakat dapat berperan dalam proses pengawasan. Selain itu, meskipun sudah ada upaya seperti musyawarah desa untuk menyampaikan informasi mengenai anggaran, partisipasi masyarakat dalam proses ini masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana transparansi pengelolaan dana desa diterapkan di kecamatan posigadan. Penelitian ini juga akan menilai seberapa efektif masyarakat dalam mengakses informasi terkait anggaran, serta sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta menemukan solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi atas realisasi anggaran desa tahun 2021-2023, serta observasi terhadap pelaksanaan musyawarah desa dan penyediaan informasi publik. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan dan Akses Informasi yang Jelas tentang Perencanaan, Prosedur Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Posigadan telah menyediakan informasi mengenai anggaran dana desa melalui baliho dan papan pengumuman. Namun, informasi tersebut masih bersifat umum dan tidak mencakup rincian yang dapat membantu masyarakat memahami sepenuhnya bagaimana dana digunakan. Masyarakat umumnya mengetahui bahwa ada alokasi dana desa, tetapi tidak semua memahami secara mendalam mengenai rencana kegiatan, jumlah anggaran, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan. Warga mengaku jarang meminta informasi atau dokumen perencanaan seperti RKPDDes atau APBDes. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak desa serta tidak adanya prosedur yang jelas untuk mengakses informasi tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi memang ada, tetapi akses terhadap informasi masih terbatas secara efektif.

Musyawarah yang Melibatkan Masyarakat

Musyawarah desa merupakan agenda rutin yang diadakan oleh pemerintah desa. Namun, pelaksanaan musyawarah di desa desa yang diteliti, seperti Desa Lion, Meyambanga Timur, dan Momalia Tiga, lebih banyak bersifat formalitas. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah umumnya hanya sebagai pendengar. Keputusan-keputusan penting umumnya sudah disiapkan sebelumnya oleh pihak pemerintah desa dan hanya dibacakan dalam forum.

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan usulan masih rendah. Banyak warga merasa enggan berbicara dalam forum atau merasa tidak punya cukup pengetahuan untuk memberi masukan. Di sisi lain, belum ada upaya sistematis dari pemerintah desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah.

Keterbukaan proses pengelolaan dana desa

Dalam pengamatan terhadap proses pengelolaan dana desa, ditemukan bahwa keterbukaan lebih tampak pada pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau drainase. Masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Namun, proses awal seperti perencanaan kegiatan, pemilihan pihak pelaksana, dan pengadaan barang atau jasa tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. Informasi mengenai tahapan pelaksanaan dan evaluasi juga tidak disampaikan secara terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana keputusan keputusan dalam pengelolaan dana diambil.

Keterbukaan Informasi tentang Dokumen Pengelolaan Dana Desa

Akses terhadap dokumen pengelolaan dana desa masih sangat terbatas. Masyarakat tidak mengetahui di mana dan bagaimana cara mendapatkan dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, atau laporan pertanggungjawaban. Walaupun pemerintah desa mengklaim dokumen tersebut tersedia dan bisa diakses, tidak ada sistem atau prosedur yang memudahkan warga untuk memperoleh dokumen tersebut. Sebagian warga merasa sungkan atau takut dianggap mencampuri urusan pemerintahan desa jika meminta dokumen tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif dokumen tersedia, secara praktis akses terhadap dokumen tersebut belum benar-benar terbuka bagi masyarakat.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kecamatan Posigadan merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Indikator transparansi yang mencakup penyediaan dan akses informasi, musyawarah masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan, serta keterbukaan dokumen anggaran menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan transparansi secara menyeluruh di tingkat desa. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang lengkap dan akurat terkait pengelolaan dana desa, serta belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah *Enterprise Theory Ida*. 3(60), 65–81.
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>
- Jaya, T., Ogan, K., Ilir, K., Purba, R. H., & Widodo, S. (2022). Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Administrasi Publik*, 3, 18–29. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.40>
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Masruroh. (2022). Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan , Kota Wisata Batu) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Haryono No . 193 , Malang , 65144 , Indonesia Pendahulua. *Jurnal Respon Publik*, 16(2), 53–60.
- maya Wulan Pramesti. (2018). Dimensi - Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam. *JURNAL POLITEA*, 1(1), 37–48.
- Pebriyanto A. Hulinggi, Ismet Sulila, R. T. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Patra, I., Abdussamad, J., & Tui, F. P. (2023). Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 2376–2395.
- Supriyadi, E. I. (2022). Pergeseran dalam paradigma ilmu administrasi publik. *SOSIAL Dan Humaniora*, 3(April 2021), 9–16. <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Susprianto, H., Hartutiningih, & Hartutiningih. (2023). Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa PA'Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Henry. *EJournal Pembangunan Sosial*, 11(2), 1–9. <http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>
- Syahfitri, R. W. dan D. I. (2023). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi

- Kasus Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa). *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(9), 127–148.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Tampi, J., Engka, D. S. M., L, S. Y., & Tumangkeng. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 133–144.
- Wulandari, S., & Eriswanto, E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. *Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 275–284. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Yassir, Mursalim, A. J. (2022). YUME : Journal of Management Pengaruh Akuntabilitas Keuangan , Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *Journal of Management*, 5(2), 477–494. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>
- Yulianti, L. A., Alviani, A. W., Muchlisun, M., & Anwar, A. U. A. U. S. (2020). Optimalisasi Dana Desa Melalui Analisis Pembelanjaan Di Desa Pabelan Kabupaten Semarang. *Abdi Insani Universitas Mataram*, 7(April), 19–26.